

# Konflik-Sosial dan Resolusi Konflik: Analisis Sosio-Budaya (Dengan Fokus Perhatian Kalimantan Barat)<sup>1</sup>

Oleh

Dr. Ir. Arya Hadi Dharmawan, MSc.Agr<sup>2</sup>

## 1. Pendahuluan: Materialisme dan *Post-Materialisme*

Sejak era-reformasi dan transformasi kehidupan sosial-politik *via* paham demokratisme mulai menggelinding dan dijalankan secara “konstruktif” pada tahun 1998 (masa kejatuhan Orde Baru/ORBA), maka sejak saat itu pula perjalanan kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat di Indonesia memasuki tahapan baru yaitu tidak pernah terlepasnya warga dari carut-marut konflik sosial. Konflik sosial yang selama 30 tahun rejim ORBA di“tabu”kan oleh negara dan warga masyarakat, seolah kini menjadi tindakan-nyata yang sah, lazim dan *justifiable* dalam sistem tata-kehidupan berasaskan demokrasi.

Benturan sosial demi benturan sosial berlangsung dengan mengambil bentuk aneka-rupa serta menyentuh hampir di segala aspek (“*frame of conflict*”) kehidupan masyarakat (konflik *agraria*, *sumberdaya alam*, *nafkah*, *ideologi*, *identitas-kelompok*, *batas teritorial*, dan semacamnya). Satu hal yang perlu dicatat adalah bawa apapun bentuk benturan sosial yang berlangsung akibat dari konflik sosial, maka akibatnya akan selalu sama yaitu *stress sosial*, *kepedihan* (*bitterness*), *disintegrasi sosial* yang seringkali juga disertai oleh musnahnya aneka *aset-aset material* dan *non-material*. Kehancuran asset-asset non-material yang paling kentara ditemukan dalam wujud “dekapitalisasi” modal sosial yang ditandai oleh hilangnya *trust* di antara para-pihak yang bertikai, rusaknya *networking*, dan hilangnya *compliance* pada tata aturan *norma dan tatanan sosial* yang selama ini disepakati bersama-sama). Seolah semua yang telah dengan susah payah dibangun dan ditegakkan oleh masing-masing warga yang bertikai, dengan mudah diakhiri begitu saja karena konflik sosial. Dari perspektif politik ketatanegaraan, kebijakan otonomi daerah (OTDA), hingga taraf tertentu juga ikut menyumbang *memperburuk situasi konflik sosial* di atas. Peristiwa demi peristiwa konflik sosial yang berlangsung di Indonesia selama 10 tahun terakhir menunjukkan adanya titik berat yang nyata pada basis *materialisme*<sup>3</sup>, daripada basis *post-materialisme*<sup>4</sup>. Kendati

---

<sup>1</sup> Makalah disusun dan disajikan pada Seminar dan Lokakarya Nasional Pengembangan Perkebunan Wilayah Perbatasan Kalimantan, dengan tema: “Pembangunan Sabuk Perkebunan Wilayah Perbatasan Guna Pengembangan Ekonomi Wilayah dan Pertahanan Nasional”, Pontianak 10-11 Januari 2007.

<sup>2</sup> Dosen Pasca Sarjana pada Program Studi Sosiologi Pedesaan dan Pengelolaan sumberdaya Alam dan Lingkungan, Ketua Program Studi KPM Departemen Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat IPB dan Sekretaris Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan IPB.

<sup>3</sup> Konflik sosial yang digerakkan oleh “gerakan sosial klasik” (*old social movement*) yang sepenuhnya berorientasikan pada gugatan rasa-keadilan materiil. Secara konkret, konflik sosial mewujudkan dalam bentuk tuntutan pemenuhan kebutuhan minimal pokok demi menjaga kelangsungan kehidupan masyarakat, seperti: redistribusi lahan bagi petani non-tanah, tuntutan peningkatan upah-minimum bagi buruh industri, peningkatan derajat kesehatan, pendidikan dan pelayanan umum lainnya bagi masyarakat miskin, dan sebagainya.

<sup>4</sup> Konflik sosial yang dimunculkan oleh “gerakan sosial baru” (*new social movement*) yang berorientasikan sangat kuat pada pemenuhan kebutuhan akan pengakuan atas eksistensi ideologi baru atau arus-pemikiran baru dalam sistem tata-kehidupan sosio-politik nasional. Ideologi-ideologi seperti

demikian, bukan berarti *post-materialism-based social conflict* tidak ada samasekali di Indonesia. Berbagai macam demonstrasi massa yang menuntut agar negara secara konsisten menegakkan agenda demokrasi, desentralisme, penyelamatan lingkungan hidup, perang terhadap korupsi, perjuangan hak-hak perempuan, dan sebagainya adalah wujud riil dari hadirnya dinamika konflik sosial berbasis post-materialisme di Indonesia selama 10 tahun terakhir.

Meningginya intensitas dan keluasan konflik sosial sejak era reformasi di Indonesia, tidak dapat disangkal telah mencengangkan banyak kalangan. Ketercengangan ini tentu saja sangat bisa dipahami, karena sejarah stereotipe bangsa Indonesia selama ini lebih banyak ditandai oleh ciri-ciri “bangsa nan ramah”, “bangsa nan penuh toleransi”, namun pada saat pasca ORBA ternyata masyarakat Indonesia justru menunjukkan karakter keberingasannya dengan *degree of violence*-nya yang menembus “batas-batas rasa kemanusiaan”, yang tidak bisa diterima oleh bangsa manapun di dunia (lihat paparan Tabel-tabel di bagian selanjutnya). Pertanyaannya, adakah sindroma anomali-sosial yang memang menjadi ciri-khas budaya bangsa Indonesia? Ataukah, konflik sosial memang tidak dapat dielakkan terjadi pada bangsa manapun di dunia manakala stress sosial yang berakar pada banyak faktor penyebab telah mencapai titik-puncaknya?

Tulisan ini hendak menelaah serba ringkas kajian sosiologi konflik sosial di Indonesia dan mencari peluang-peluang resolusinya. Telaahan akan dilakukan dengan pertamanya membedah “anatominya konflik sosial” di Indonesia (khususnya Kalimantan Barat) secara singkat, kemudian mengidentifikasi sumber penyebabnya dan selanjutnya mencari kemungkinan resolusinya. Data yang digunakan sebagai basis analisis disitasi dari berbagai data sekunder dan sumber pustaka yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

## 2. Arena Konflik: Tiga Ruang Kekuasaan

Konflik sosial bisa berlangsung pada *aras antar-ruang kekuasaan*. Terdapat tiga ruang kekuasaan yang dikenal dalam sebuah sistem sosial kemasyarakatan, yaitu “ruang kekuasaan negara”, “masyarakat sipil atau kolektivitas-sosial”, dan “sektor swasta” (Bebbington, 1997; dan Luckham, 1998). Konflik sosial bisa berlangsung di dalam setiap ruangan ataupun melibatkan agensi atau struktur antar-ruangan kekuasaan. Selanjutnya Gambar 1 berikut dapat diamati sebagai berikut.



Gambar 1. Tiga Ruang dimana Konflik Sosial Dapat Berlangsung (diadopsi dengan modifikasi dari Bebbington, 1997)

---

demokratisme, *ecologism*, *sustainability*, *good-governance*, *feminisme* adalah contoh-contoh dari arus-pemikiran baru yang menghendaki pengakuan tersebut.

Dengan mengikuti model konflik sosial berperspektifkan ruang-kekuasaan dari Bebbington (1997) sebagaimana skemanya tergambar pada Gambar 1 di atas, maka **konflik sosial antar “pemangku kekuasaan”** dapat berlangsung dalam tiga bentuk, yaitu:

- (1) Warga masyarakat sipil atau kolektivitas sosial berhadap-hadapan melawan negara dan sebaliknya. Dalam hal konflik sosial dapat terjadi dalam bentuk protes warga masyarakat atas kebijakan publik yang diambil oleh negara/pemerintah yang dianggap tidak adil dan merugikan masyarakat secara umum. Perlawanan asosiasi pedagang kaki-lima di Jakarta melawan penggusuran oleh Pemerintah DKI Jaya adalah contoh klasik yang terus kontemporer.
- (2) Konflik sosial yang berlangsung antara warga masyarakat atau kolektivitas sosial melawan swasta dan sebaliknya. Contoh klasik dalam hal ini adalah “perseteruan berdarah” yang terus berlangsung (bahkan hingga kini) antara komunitas lokal melawan perusahaan pertambangan multi-nasional di Papua. Kasus serupa juga ditemui dalam “Tragedi Pencemaran Teluk Buyat” yang memperhadapkan warga lokal yang menderita kesakitan akibat pencemaran air terus-menerus dari limbah *tailing* aktivitas penambangan emas oleh perusahaan swasta asing di Sulawesi Utara di awal dekade 2000an.
- (3) Konflik sosial yang berlangsung antara swasta berhadap-hadapan melawan negara dan sebaliknya. Berbagai tindakan yang diambil oleh Pemerintah/Negara dalam mengawal jalannya sebuah kebijakan, biasanya memakan biaya sosial berupa konflik tipe ini secara tidak terelakkan.

Dinamika konflik sosial antar-ruang kekuasaan akan berlangsung makin kompleks, manakala unsur-unsur pembentuk sebuah ruang kekuasaan tidak merepresentasikan struktur sosial dengan atribut/identitas sosial yang homogen. Di ruang kekuasaan **negara**, termuat sejumlah konflik sosial internal baik yang bersifat *latent* (terselubung-terpendam) maupun *manifest* (mewujud-nyata). Dalam hal ini, contoh yang paling mudah terjadi adalah konflik sosial yang berlangsung dalam praktek *manajemen pemerintahan* akibat *olah-kewenangan* dalam pengendalian pembangunan yang berlangsung secara hierarkhikal antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat. Konflik yang lebih banyak mengambil bentuk “konflik kewenangan” tersebut mengemuka sejak rejim pengaturan pemerintahan desentralisasi berlangsung penuh sejak Undang-Undang (UU) No. 22/1999 dilanjutkan dengan UU No. 32/2004 sebagai konsekuensi OTDA. Konflik antar pemerintah. Konflik sosial horisontal, juga berlangsung antar departemen sektoral di pemerintahan pusat, ataupun antara satu pemerintah kabupaten berhadap-hadapan melawan pemerintah kabupaten lain dalam suatu kebijaksanaan tertentu.

Di ruang kekuasaan **masyarakat sipil** atau kolektivitas sosial, berlangsung konflik sosial yang tidak kalah intensifnya antara sesama kolektivitas sosial dalam mempertentangkan suatu obyek yang sama. Hal ini dipicu oleh cara pandang yang berbeda-beda dalam memaknai suatu persoalan. Perbedaan mazhab atau ideologi yang dianut oleh masing-masing pihak bersengketa menjadikan friksi sosial dapat berubah menjadi konflik sosial yang nyata. Beberapa contoh aras konflik ini bisa disebutkan antara lain adalah, *tawuran antar warga* yang dipicu oleh hal-hal yang dalam “kehidupan normal” dianggap sederhana (sepele), seperti masalah batas wilayah administratif (desa atau kabupaten) yang hendak dimekarkan sebagai konsekuensi OTDA. Sementara itu, di ruang ini juga bisa berlangsung konflik sosial yang melibatkan perbedaan identitas sosial komunal (*ethno-communal conflict*) seperti *ras*,

**etnisitas dan religiositas.** Konflik-konflik sosial yang berlangsung antara para penganut mazhab pada sebuah agama tertentu (**konflik sektarian** sebagaimana terjadi antara penganut “Ahmadiyah” versus “non-Ahmadiyah”) juga terjadi secara dramatis di ruang masyarakat sipil di Indonesia. Konflik sosial yang berlangsung di ruang masyarakat sipil menghasilkan dampak yang paling “beraneka warna” (karena diversenya persoalan yang dijadikan obyek konflik) dan berlangsung cukup memprihatinkan (berujung pada kematian, cedera, dan kerusakan) di Indonesia. Beberapa kawasan di provinsi-provinsi DKI Jakarta, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah (Poso) ataupun Maluku dan Maluku Utara sepanjang akhir dekade 1990an hingga paruh pertama dekade 2000an menjadi ajang konflik sosial antar-komunitas atau *communal-conflict* (lihat, Varshney, *et al.* 2006). Selanjutnya lihat data konflik sosial komunal di Kalimantan Barat (Tabel 1 dan 2 pada bagian lebih lanjut).

Sementara itu di ruang kekuasaan **swasta**, konflik sosial lebih banyak terjadi oleh karena persaingan usaha yang makin ketat. Kendati demikian, konflik sosial juga bisa dipicu oleh karena kesalahan Negara dalam mengambil kebijakan dalam “pemihakan” kepada kaum lemah. Misalnya, konflik sosial para pedagang UKM (Usaha Kecil Menengah) melawan perusahaan retail swasta multinasional yang merasuki kawasan-kawasan yang sesungguhnya bukan “lahan bermain” mereka. Selain itu, konflik-konflik berdarah yang berlangsung antara nelayan trawl (pukat harimau) bermodal kuat melawan nelayan atau koperasi nelayan kecil (bermodal lemah) di berbagai daerah, adalah salah satu contoh klasik konflik di ruang ini.

### 3. Kedalaman dan Skala Konflik

Sebagai bagian dari proses-proses sosial, dalam banyak kasus dijumpai bahwa konflik sosial tidak berlangsung secara serta-merta. Meski tipe konflik sosial yang bersifat “*spontaneous conflict*” tetap ada (misalnya tawuran para pendukung kesebalasan sepakbola yang sedang bertanding), namun jenis konflik yang “serta-merta” tersebut biasanya lebih mudah dikendalikan dan segera diredam, daripada yang bersifat *konstruktif* dan *organized*.

Dalam hal dijumpai kasus-kasus konflik sosial yang bertipe “**constructive social conflict**”, ada sejumlah prasyarat yang memungkinkan konflik sosial dapat berlangsung, antara lain: (1) ada **isu-kritikal** yang menjadi perhatian bersama (*commonly problematized*) dari para pihak berbeda kepentingan, (2) ada **inkompatibilitas harapan/kepentingan** yang bersangkutan-paut dengan sebuah obyek-perhatian para pihak bertikai, (3) gunjingan/**gossip** atau **hasutan** serta fitnah merupakan tahap inisiasi konflik sosial yang sangat menentukan arah perkembangan konflik sosial menuju wujud riil di dunia nyata, (4) ada kompetisi dan **ketegangan psiko-sosial** yang terus dipelihara oleh kelompok-kelompok berbeda kepentingan sehingga memicu konflik sosial lebih lanjut. Pada derajat yang paling dalam, segala prasyarat terjadinya konflik akan memicu (5) “**masa kematangan untuk perpecahan**” yang diakhiri oleh (6) clash yang bisa disertai dengan violence (kerusakan dan kekacauan). Konflik sosial bisa berakibat sangat luas dan berlangsung dalam jangka waktu lama, bila semua tahapan tersebut diorganisasikan dengan baik (**organized social conflict**) seperti yang terjadi antara Republik Indonesia melawan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) beberapa waktu lalu. Sementara itu, dampak konflik dapat cepat ditekan perluasannya, jika sifatnya tidak terorganisasikan dengan baik (**unorganized social conflict**).

Jikalau dilihat dari perspektif *kecepatan reaksi* (*speed of reaction*) yang diberikan para pihak atas ketidaksepahaman yang terbentuk di kalangan berkonflik, maka konflik sosial dapat berlangsung dalam beberapa **variasi tipe/bentuk**, yaitu:

1. Gerakan sosial damai (*peaceful collective action*) yang berlangsung berupa aksi penentangan, yang dapat berlangsung dalam bentuk: “aksi korektif”, “mogok kerja”, “mogok makan”, dan “aksi-diam”. Dalam hal tidak ditemukan resolusi konflik yang memuaskan, maka aksi damai dapat dimungkinkan berkembang menjadi “aksi membuat gangguan umum” (*strikes and civil disorders*) dalam bentuk demonstrasi ataupun huru-hara.
2. Demonstrasi (*demonstrations*) atau protes bersama (*protest gatherings*) adalah kegiatan yang mengekspresikan atas ketidaksepahaman yang ditunjukkan oleh suatu kelompok atas suatu isu tertentu. Derajat tekanan konflik kurang-lebih sama dengan pemogokan. Aksi kolektif seperti ini biasanya diambil sebagai protes yang reaksioner yang dilakukan secara berkelompok ataupun massal atas ketidaksepahaman yang ditunjukkan oleh suatu pihak tertentu kepada pihak berseberangan atas suatu masalah tertentu. Biasanya skala bersifat lokalitas, sporadik (meski tidak tertutup kemungkinan dapat meluas).
3. Kerusuhan dan huru-hara (*riots*), adalah peningkatan derajat keberingasan (*degree of violence*) dari sekedar demonstrasi. Kerusuhan berlangsung sebagai reaksi massal atas suatu keresahan umum. Oleh karena disertai dengan *histeria massa*, maka huru-hara seringkali tidak bisa dikendalikan dengan mudah tanpa memakan korban luka (bahkan kematian).
4. Pemberontakan (*rebellions*) adalah konflik sosial berkepanjangan yang biasanya digagas dan direncanakan lebih konstruktif dan terorganisasikan dengan baik. Pemberontakan bisa menyangkut perjuangan atas suatu kedaulatan atau mempertahankan “kawasan” termasuk eksistensi ideologi tertentu. Pemberontakan tidak harus berlangsung secara *manifest*, melainkan bisa diawali “di bawah tanah” sehingga tampak *latent* sifatnya.
5. Aksi radikalisme-revolusioner (*revolutions*) adalah gerakan penentangan yang menginginkan perubahan sosial secara cepat atas suatu keadaan tertentu.
6. Perang adalah bentuk konflik antar negara yang sangat tidak dikehendaki oleh masyarakat dunia karena dampaknya yang sangat luas terhadap kemanusiaan.

#### **4. Konflik Komunal: *Livelihood and Identity Struggle***

Konflik sosial yang berlangsung antar kelompok (*inter-group social conflict*) di ruang masyarakat sipil (lihat Gambar 1), dapat menyangkut **krisis pluralitas-sosio-budaya** dan **bernuansa identitas** sosial. Konflik tersebut merupakan konflik yang paling sering terjadi di Indonesia seiring dengan krisis ekonomi dan jatuhnya rejim ORBA di tahun 1997. Dalam konflik bernuansa **etno-komunal**, sangat tampak nyata adanya para pihak yang membawa *atribut identitas ideologi, identitas antar-keagamaan, identitas kelompok atau juga perbedaan mazhab pada agama yang sama (konflik sektarian), serta perbedaan asal-usul atau keturunan* sebagai pembeda utama kelompok yang saling menggugat, pelancaran klaim, atas persoalan yang disengketakan.

Meskipun akar-konflik yang bertanggung jawab atas terjadinya **konflik sosial komunal** di Indonesia sangatlah berbeda-beda, namun ada beberapa hal yang membuatnya sama

yaitu adanya **radikalisasi perbedaan identitas**, radikalisasi **komunalisme**<sup>5</sup> serta dianutnya **bounded rationality**<sup>6</sup> yang memicu “kesadaran kelas” (*class consciousness* ala Marx) dalam kelompok-kelompok yang bertikai. Hal-hal tersebut tidak bisa dielakkan ikut bertanggung jawab dan memperkuat dorongan kepada setiap warga untuk saling bersengketa dengan warga dari kelompok lainnya dan jika mungkin saling meniadakan (*eliminating strategy*). Pemahaman konflik sosial seperti ini dianut oleh para ahli sosiologi yang mendasarkan analisisnya pada perbedaan **basis sosio-kultural** (perspektif kulturalisme) yang dianut masyarakat.

Disadari ataukah tidak disadari, konflik sosial komunal di ruang sipil, seringkali ditemukan benang-merah akar penyebabnya tersimpan mendalam (*deeply rooted*) pada persoalan **livelihood distress**. Persoalan **kemiskinan** dan **keterdesakan ekonomi** bercampur-baur dengan perasaan ketidakpastian kehidupan (*survival insecurity*) akibat datangnya kompetitor dari sekelompok warga atau masyarakat (biasanya dengan identitas tertentu), menyebabkan eskalasi dan intensitas konflik sangat mudah memuncak.

Dalam tataran konflik antar kelompok ini, kepentingan individual dalam kelompok seringkali juga diabaikan, karena telah diwakili oleh kepentingan kelompok (individu mengalami gejala sosial yang dikenal sebagai *oversocialized processes* dimana tujuan dan kepentingan kolektif menjadi segala-galanya). Artinya, persaingan antar individu pada suatu kelompok melawan kepentingan individu pada kelompok yang berbeda menjadi bagian integral konflik sosial antar kelompok. Dengan kata lain konflik sosial selalu melibatkan perselisihan antar kelompok (partai/pihak) dimana individu di dalamnya menjadi konstituen pendukung perjuangan kelompoknya masing-masing. Demikianlah sehingga pada banyak kasus, konflik kelompok (*group conflict*) dipakai untuk menunjuk pengertian konflik sosial (*social conflict*).

Konflik sosial semacam ini memang dapat dipahami melalui *perspektif materialisme*, dimana **basis material** (*sustenance needs security* atau masalah *livelihood/nafkah*) bagi kehidupan sekelompok warga sebagai akar konflik sosial yang harus diselesaikan

---

<sup>5</sup> Komunalisme adalah etika yang ditandai oleh semangat **kolektivitas berwawasan identitas sempit** (*narrow mindedness*) yang dianut oleh individu-individu yang terikat dalam suatu kelompok atau ikatan sosial-kemasyarakatan tertentu dimana basis ikatan sosial biasanya dibangun melalui pengembangan ciri identitas ideologi atau keyakinan tertentu. Setiap warga atau anggota yang berada dalam ikatan-sosial tersebut akan selalu memandang bahwa kelompoknyalah yang terpenting dan paling-berhak untuk eksis dalam kehidupan, dibanding warga dari kelompok lain. Salah satu ciri **etika-komunalisme** adalah ditemukannya ciri *in-group feeling* yang sangat kuat (bahkan cenderung berlebihan) dan menafikan eksistensi kelompok lain dalam jejaring hubungan sosial masyarakat yang dibangunnya. Jika menyimak pelajaran yang dipetik dari Eropa Barat, etika ini utamanya dikembangkan oleh sekelompok orang yang mengagungkan ciri nasionalisme-berlebih-lebihan dan pada taraf lanjut etika ini berkembang menjadi **ideologi-rasisme** yang saat ini dianut oleh partai-partai kanan-radikal yang sangat keras dan berpandangan sangat sempit tentang paham kebangsaan. Komunal konflik ditengarai terus menguat di banyak kawasan sejak era perang dingin berakhir tahun 1990an (Anonymous, 1996)

<sup>6</sup> Rasionalitas ini diturunkan dari kerangka “teori tindakan rasional individual” dari Weber. Dalam hal ini, setiap individu selalu mengambil sikap untuk mengedepankan kepentingan kelompok daripada kepentingan individu, sekalipun pemikiran itu sebenarnya “membelenggu” kepentingan individual. Pengedepanan kepentingan kelompok tersebut seringkali menjadi “jebakan struktural” bagi seseorang, karena individu tidak mampu membebaskan dirinya untuk mengekspresikan kepentingannya sendiri. Dalam banyak kejadian konflik sosial di Indonesia, individu-individu warga masyarakat yang terjebak dalam “**rasionalitas-terikat**” secara sempit sehingga seseorang tidak mampu melepaskan diri dari ideologi-dan-rasionalitas kelompoknya, karena individu warga dihindangi perasaan takut dianggap bertentangan atau menyimpang dari kelompoknya dan berakibat diasingkan.

terlebih dahulu. Ketidaksiapan sekelompok orang untuk hidup dalam suasana kehidupan yang saling-berkoeksistensi di suatu kawasan, juga merupakan penjelasan tersendiri munculnya konflik horisontal-komunal ini. Dengan asumsi “social-economic stress”, maka konflik sosial menuntut penyelesaian di wilayah materialisme secara konstruktif.

## 5. Bingkai Konflik Sosial

Coser (1967) sebagaimana dikutip Oberschall (1978) mendefinisikan konflik sosial sebagai berikut: “*social conflict is a struggle over values or claims to status, power, and scarce resources, in which the aims of the conflict groups are not only to gain the desired values, but also to neutralise, injure, or eliminate rivals*”. Dengan mengacu pada pengertian konseptual tentang konflik sosial tersebut, maka proses konflik sosial akan meliputi spektrum yang lebar. Isyu-isyu kritical yang membingkai konflik sosial yang seringkali dijumpai dalam sistem sosial (di segala tataran) adalah:

1. Konflik antar kelas sosial (*social class conflict*) sebagaimana terjadi antara “kelas buruh” melawan “kelas majikan” dalam konflik hubungan-industrial, atau “kelas tuan tanah” melawan “kelas buruh-tani” dalam konflik agraria.
2. *Modes of production conflict* (konflik moda produksi dalam perekonomian) yang berlangsung antara kelompok pelaku ekonomi bermodakan (cara-produksi) ekonomi peasantry-tradisionalisme (pertanian skala kecil subsisten-sederhana) melawan para pelaku ekonomi bersendikan moral-ekonomi akumulasi profit dan eksploitatif.
3. Konflik sumberdaya alam dan lingkungan (*natural resources conflict*) adalah konflik sosial yang berpusat pada isyu “*claim dan reclaiming*” penguasaan sumberdaya alam (tanah atau air) sebagai pokok sengketa terpenting. Dalam banyak hal, konflik sumberdaya alam berimpitan dengan *konflik agraria*, dimana sekelompok orang memperjuangkan hak-hak penguasaan tanah yang diklaim sebagai *property* mereka melawan negara, badan swasta atau kelompok sosial lain.
4. Konflik ras (*ethnics and racial conflict*) yang mengusung perbedaan warna kulit dan atribut sub-kultural yang melekat pada warna kulit pihak-pihak yang berselisih.
5. Konflik antar-pemeluk agama (*religious conflict*) yang berlangsung karena masing-masing pihak mempertajam perbedaan prinsip yang melekat pada ajaran masing-masing agama yang dipeluk mereka.
6. Konflik sektarian (*sectarian conflict*), adalah konflik yang dipicu oleh perbedaan pandangan atau ideologi yang dianut antar pihak. Konflik akan makin mempertajam perbedaan pandangan antar mazhab (seringkali pada ideologi yang sama).
7. Konflik politik (*political conflict*) yang berlangsung dalam dinamika olah-kekuasaan (*power exercise*).
8. *Gender conflict* adalah konflik yang berlangsung antara dua penganut pandangan berbeda dengan basis perbedaan adalah jenis-kelamin. Para pihak mengusung kepentingan-kepentingan (politik, kekuasaan, ekonomi, peran sosial) yang berbeda dan saling berbenturan antara dua kelompok penyokong yang saling berseberangan.
9. Konflik-konflik antar komunitas (*communal conflicts*), yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti: eksistensi identitas budaya komunitas dan faktor sumberdaya kehidupan (*sources of sustenance*). Konflik komunal seringkali bisa berkembang menjadi konflik teritorial jika setiap identitas kelompok melekat juga identitas kawasan.

10. Konflik teritorial (*territorial conflict*) adalah konflik sosial yang dilancarkan oleh komunitas atau masyarakat lokal untuk mempertahankan kawasan tempat mereka membina kehidupan selama ini. Konflik teritorial seringkali dijumpai di kawasan-kawasan Hak Pengusahaan Hutan (HPH), dimana komunitas adat/lokal merasa terancam sumber kehidupan dan identitas sosio-budayanya manakala penguasa HPH menghabisi pepohonan dan hutan dimana mereka selama ini bernaung dan membina kehidupan sosial-budaya dan sosio-kemasyarakatan.
11. *Inter-state conflict* adalah konflik yang berlangsung antara dua negara dengan kepentingan, ideologi dan sistem ekonomi yang berbeda dan berbenturan kepentingan dengan pihak lain negara.
12. Dalam kecenderungan global, *inter-state conflict* bisa berkembang menjadi *regional conflict* sebagaimana terjadi pada era “perang dingin” (Blok Uni Soviet vs Blok USA), atau peperangan di Balkan pada akhir dekade 1990an, dimana USA dan NATO menghabisi Serbia.

## 6. Profil Konflik Sosial di Indonesia dan Kalimantan Barat

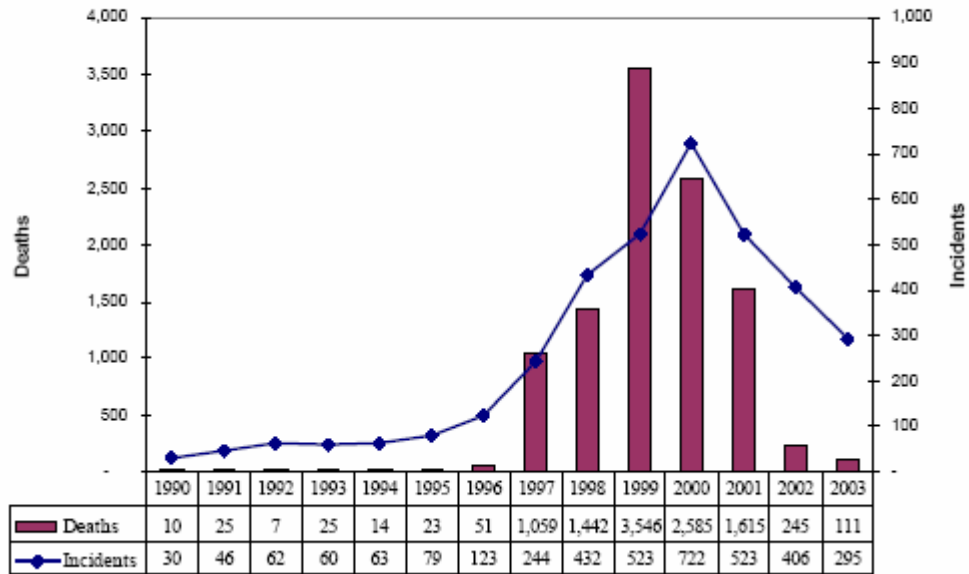
Secara kesejarahan bangsa Indonesia sesungguhnya bukanlah bangsa yang “bebas dari konflik sosial” (*social-conflict free*). Jatuh bangun dan perluasan kekuasaan pemerintahan kerajaan-kerajaan Hindu (seperti Majapahit) dan Islam (Mataram) di nusantara sangat kental dengan strategi konflik sosial yang bahkan menjadi *mode of struggle* mereka. Sejarah pergerakan nasional modern yang diinisiasi oleh Budi Utomo pun sangat kental dengan aroma pertentangan-perjuangan dan kesadaran-kelas antara bangsa terjajah melawan bangsa penjajah (Belanda). Tahun 1945 adalah titian tertinggi proses-proses konfliktual yang ditandai dengan lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui perjuangan dan perjalanan konflik yang sangat melelahkan dan memakan banyak korban.

Hingga detik ini pun, konflik sosial bahkan terus terjadi secara berulang dan terus-menerus mereplikasi-dirinya dari satu tempat ke lain tempat dengan bentuk yang beraneka-rupa di seluruh penjuru wilayah Indonesia. Konflik sosial, seolah kini telah menjadi bagian dari “rutinitas dan keseharian” masyarakat Indonesia. Intensitas dan persebaran kejadian konflik sosial menguat sejalan dengan multiplikasi kejadian konflik sosial yang dihembuskan-diberitakan melalui berita-berita tentang konflik sosial di media massa. Pemunculan berita tentang konflik sosial di koran dan televisi telah membuat “proses sosialisasi” tanpa disadari telah membentuk opini tentang perbedaan kepada warga masyarakat di lain tempat untuk meniru dan mengimitasi “proses-proses penyelesaian masalah melalui jalan kekerasan dan *violence*” bagi persoalan serupa yang dijumpai di lokalitas masing-masing.

Melihat proses-proses konflik sosial yang demikian tertanam dalam sejarah dan terus “disegarkan” dalam ingatan tiap warga melalui media-media informasi dan pendidikan, maka sesungguhnya konflik sosial di Indonesia bukanlah “barang baru dan aneh”. Ia hanya berubah bentuk dan semangat. Secara umum kecenderungan terjadinya konflik sosial di Kalimantan Barat mengikuti kecenderungan yang terjadi di Indonesia. Sementara pola konflik sosial (bentuk, latar belakang atau akar-masalah konflik, kedalaman, dan skala konflik) pun tidak jauh berbeda. Varshney et. al (2006) dengan mengambil pelajaran konflik sosial yang berlangsung di Indonesia selama 1990-2003 memetakan kecenderungan kejadian konflik sebagaimana dipaparkan pada Gambar 2 berikut ini.



Deaths and incidents of collective violence in indonesia, 1990-2003



Sumber: Varshney, A. et. al. 2006

Gambar 2. Insiden Kematian Akibat Konflik Sosial di Indonesia 1990-2003

Tampak pada Gambar 2 di atas bahwa jika diukur dengan angka kematian akibat konflik dan frekuensi kejadiannya, maka kecenderungan eskalasi konflik meningkat dalam kurun 1990-2000 dan menurun dalam kurun 2001-2003. Dengan dua indikator tersebut Varshney (2006) menjelaskan bahwa puncak konflik sosial di Indonesia dicapai pada tahun 1998 (angka kematian) dan 2000 (jumlah kejadian konflik sosial). Dioperkirakan, beberapa faktor yang bertanggung jawab atas kejadian konflik sosial tersebut adalah: (1) *political power stress* yang diderita kekuatan-kekuatan yang selama ini “dibelenggu” oleh rejim otoritarian ORBA; (2) *perubahan rejim politik ketatanegaraan* yang memberikan kebebasan kuat kepada setiap orang dan kelompok sosial untuk mengekspresikan keinginannya secara lebih bebas; (3) *social-economic distress* yang diderita banyak orang akibat krisis ekonomi di tahun 1997 yang dampaknya masih dirasakan hingga kini; (4) kesadaran akan kebutuhan akan penghargaan sosial atas eksistensi kelompok/identitas yang makin menguat di kalangan komunitas lokal di berbagai kawasan di Indonesia.

Paralel dengan kecenderungan yang ditunjukkan oleh data makro Indonesia, peristiwa konflik sosial di Provinsi Kalimantan Barat berlangsung paling besar dan tinggi intensitasnya di tahun 1997 dan 1999 (lihat Tabel 1.). Secara sosio-budaya, perbedaan *identitas ras, etnis, religiositas dan karakter sosio-budaya* di kalangan kelompok-kelompok sosial yang hidup bersama di kawasan ini menjelaskan mengapa konflik sosial harus berlangsung. Selain itu, masalah ekonomi (konflik *sumberdaya alam* dan *teritorial-eksistensial*) juga menjelaskan mengapa konflik sosial terjadi di Kalimantan Barat (lihat juga Tabel 2 dan Tabel 3).

Dengan melihat data pada Tabel 1, 2, dan 3, maka konflik sosial yang berlangsung pada akhir dekade 1990an di Kalimantan Barat dapat dikatakan konflik multi-dimensi. Konflik sosial *tidak hanya berlangsung di ruang masyarakat sipil*, namun juga melibatkan ruang kekuasaan sosial lainnya yaitu **Negara** dan **Swasta**. Dengan

kompleksitas yang demikian, maka penyelesaian konflik sosial di Kalimantan Barat menjadi tidak sederhana.

Tabel 1. Peristiwa Konflik Sosial di Kalimantan Barat 1991-2003

Tahun Kejadian	Frekuensi Kejadian (kali)	Jumlah Terbunuh (jiwa)	Jumlah Terluka (jiwa)	Jumlah bangunan rumah yang hancur (unit)	Jumlah bangunan publik yang hancur (unit)
1991	1	1	0	0	3
1993	2	1	1	0	0
1994	1	0	0	0	1
1995	3	0	4	0	0
1996	5	3	17	268	4
<b>1997</b>	<b>17</b>	<b>1004</b>	<b>356</b>	<b>2406</b>	<b>6</b>
1998	2	4	12	0	0
<b>1999</b>	<b>28</b>	<b>481</b>	<b>180</b>	<b>942</b>	<b>7</b>
2000	10	8	46	9	5
2001	3	6	12	25	1
2002	3	6	8	40	0
2003	3	1	5	3	2

Sumber: UNSFIR, 2004

Meski kompleksitas konflik sosial di Kalimantan Barat cukup tinggi, namun konflik sosial komunal yang paling menonjol terjadi di kawasan ini. Konflik yang melibatkan Negara melawan masyarakat sipil juga agak nyata meski tidak sebesar konflik komunal.

Tabel 2. Kategori Konflik Sosial di Kalimantan Barat selama 1991-2003

Kategori Konflik Sosial	Frekuensi Kejadian (kali)	Jumlah Terbunuh (jiwa)	Jumlah Terluka (jiwa)	Jumlah Rumah yang hancur (unit)	Jumlah bangunan publik yang hancur (unit)
Hubungan Industrial	1	0	0	0	1
Sumber Daya Alam	6	0	15	0	8
<b>Ethno-Communal → Etnik Madura versus Dayak</b>	<b>19</b>	<b>1049</b>	<b>441</b>	<b>2724</b>	<b>6</b>
<b>Ethno-Communal → Etnik Madura versus Melayu</b>	<b>28</b>	<b>453</b>	<b>109</b>	<b>969</b>	<b>1</b>
Antar Aparatur Negara	2	5	15	0	1
Antar Partai Politik dan Faksi	5	0	8	0	2
Perkelahian antar warga desa, antar kampung	7	1	10	0	0
<b>Negara versus Masyarakat</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>9</b>
Pengadilan Massa ( <i>Popular Justice</i> )	1	1	0	0	1

Sumber: UNSFIR, 2004

Jika dicermati secara kewilayahan, maka konflik sosial banyak terjadi di wilayah Barat bagian Utara dari provinsi Kalimantan Barat. Hal ini dikarenakan konsentrasi penduduk dan kekayaan serta kesuburan sumberdaya alam (tanah) terletak di daerah tersebut. Bisa jadi, persoalan konflik sumberdaya alam dan konflik ekonomi yang menyertai konflik komunal memang mendapatkan penjelasan yang masuk akal di kawasan ini (lihat Tabel 3).

Tabel 3. Sebaran Konflik Sosial berdasarkan Wilayah Administratif 1991-2003

Kabupaten/Kota	Frekuensi (kejadian)	Jumlah Terbunuh (jiwa)	Jumlah Terluka (jiwa)	Jumlah rumah yang hancur (unit)	Jumlah sarana publik yang hancur (unit)
<b>Bengkayang</b>	<b>19</b>	<b>132</b>	<b>168</b>	<b>1572</b>	<b>1</b>
Kapuas Hulu	3	1	1	0	3
Ketapang	2	0	4	0	1
Kota Pontianak	21	15	70	28	7
<b>Landak</b>	<b>4</b>	<b>455</b>	<b>265</b>	<b>789</b>	<b>3</b>
<b>Pontianak</b>	<b>8</b>	<b>425</b>	<b>63</b>	<b>25</b>	<b>2</b>
<b>Sambas</b>	<b>16</b>	<b>428</b>	<b>48</b>	<b>863</b>	<b>5</b>
<b>Sanggau</b>	<b>5</b>	<b>59</b>	<b>22</b>	<b>416</b>	<b>7</b>

Sumber: UNSFIR, 2004

Konflik sosial yang melintas batas ruang kekuasaan, menyebabkan tidak mudahnya untuk menemukan penyelesaian masalah yang menyeluruh. Terlebih lagi, dimensi konflik sosial di Kalimantan Barat mencakup tidak sekedar persoalan identitas, agama (suku Dayak biasanya beragama Katolik, sementara suku Madura dan Melayu beragama Islam), namun lebih luas daripada itu ada pula faktor “*kekuatan supra-lokal*” seperti krisis ekonomi-moneter (tahun 1997-1998) ikut bermain dan mengharu-birukan konflik sosial di kawasan tersebut. Oleh karena itu, resolusi konflik disarankan untuk dijalankan secara bertahap, hati-hati, spesifik lokalitas serta tanpa menafikan *setting* makro dari setiap kejadian konflik.

## 7. Pilihan Resolusi Konflik

Tidak mudah untuk menentukan pilihan tindakan penyelesaian konflik sosial yang tepat bagi suatu sistem sosial di suatu kawasan tertentu. Solusi konflik sosial pun tidak dapat “generik”, dalam arti sebuah rumusan yang berlaku bagi suatu sistem sosial komunitas akan berlaku juga bagi sistem sosial komunitas yang lain.

Secara umum strategi resolusi konflik sepantasnya harus dimulai dengan pengetahuan yang mencukupi tentang **peta atau profil konflik sosial** yang terjadi di suatu kawasan. Dengan berbekal peta tersebut, segala kemungkinan dan peluang resolusi konflik diperhitungkan dengan cermat, sehingga setiap manfaat dan kerugiannya dapat dikalkulasikan dengan baik. Seringkali dijumpai banyak kasus bahwa sebuah pilihan solusi-tindakan rasional untuk mengatasi konflik sosial, tidaklah benar-benar mampu menghapuskan akar-persoalan konflik secara tuntas dan menyeluruh. Pada kasus-kasus yang demikian itu, maka resolusi konflik sepantasnya dikelola (*conflict management*) pada derajat dan suasana yang sedemikian rupa sehingga ledakan berupa “*clash-social*” yang bisa berdampak sangat destruktif dapat dihindarkan.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka strategi resolusi konflik dapat menempuh beberapa cara sebagaimana dipaparkan pada Gambar 3 sebagai berikut. Dalam Gambar tersebut diasumsikan bahwa konflik sosial dapat berlangsung dan melibatkan 3 (tiga) pihak (aktor/agensi atau struktur) yang berada di ketiga ruang kekuasaan (lihat Gambar 1) secara saling berhadap-hadapan sekaligus. Demikian juga di dalam setiap ruang kekuasaan, dimungkinkan terjadi konflik antar sesama aktor atau agensi maupun struktur yang berada di ruang yang sama. Konflik sosial di ruang yang sama dan terjadi paling masif di Kalimantan Barat adalah apa yang terjadi di ruang masyarakat sipil atau kolektivitas sosial. Oleh karena itu perhatian di ruang ini akan lebih banyak menjadi perhatian.

Pendekatan	Negara <i>vis a vis</i> Masyarakat	Negara <i>vis a vis</i> Swasta	Masyarakat <i>vis a vis</i> Swasta	Konflik antar masyarakat atau kolektivitas sosial	Konflik antar pemangku kekuasaan dalam ruang Negara	Konflik internal swasta
Resolusi Konflik berbasis atau berorientasi <b>nilai-kultural</b> (etik, norma)	<u>Edukasi publik</u> sebagai pendekatan penerapan <i>etika pemihakan</i> ( <i>affirmative action</i> ) kepada pihak yang lemah	<u>Edukasi publik</u>	<u>Edukasi publik</u> sebagai langkah awal bagi pengembangan <i>etika pertukaran</i> yang adil → <i>balance reciprocity</i>	Pemanfaatan <u>simbol-simbol dan norma kultural</u> sebagai pemersatu para pihak yang berkonflik	<u>Edukasi publik</u>	<u>Edukasi publik</u>
Resolusi Konflik berbasis atau berorientasi pengembangan struktur <b>kelembagaan</b>	<u>Forum Komunikasi</u> dan memberdayakan “ <u>ruang komunikasi publik</u> ” dan pengembangan kelembagaan <u>kolaboratif</u> atau <u>kemitraan</u>	<u>Forum Komunikasi</u> dan memberdayakan “ <u>ruang komunikasi publik</u> ”	<u>Forum Komunikasi</u> dan memberdayakan “ruang komunikasi publik”. Pengembangan <u>Community Development</u> atau <u>kemitraan</u> bagi masyarakat lokal	<u>Forum Komunikasi</u> dan memberdayakan “ <u>ruang komunikasi publik</u> ” serta membangun <u>kesepakatan bersama</u> berbasiskan <u>kemitraan</u> dan saling-pengertian	<u>Forum Komunikasi</u> dan <u>Kesepakatan-kesepakatan bersama</u>	Lembaga Pengawas dan Penyelesaian Persaingan Usaha

Gambar 3. Kerangka Umum Resolusi Konflik

Strategi pengembangan resolusi konflik sosial yang ditawarkan pada Gambar 3 di atas tentu saja merupakan **tawaran yang sangat umum** dan samasekali tidak dapat digunakan sebagai solusi konflik jitu di tingkat lokal dimana ditemukan jenis konflik sosial yang khas penyebab, bentuk dan dinamikanya. Oleh karena itu, sebagai pendekatan strategik, maka tawaran-tawaran solusi konflik di atas harus dikembangkan lebih lanjut agar dapat digunakan secara efektif sebagai penawar konflik sosial di tingkat lokalitas.

## 8. Penutup: *Participatory Approach*

Konflik sosial yang berlangsung di Indonesia terutama di Kalimantan Barat, berdimensi sangat luas. Konflik berlangsung terutama di **ruang masyarakat sipil** yang melibatkan kelompok-kelompok sosial dengan *identitas sosial-budaya* tertentu (antar *ethnic-group* dan antar pemeluk *berbeda agama*). Selain itu terdapat pula konflik sosial yang berlangsung antara Negara *versus* Masyarakat, demikian pula Swasta *versus* Masyarakat Masyarakat (lokal). Derajat kedalaman konflik sosial juga “sangat dalam” dimana konflik sosial membawa akibat kematian, cedera, dan juga kehancuran struktur sosial-ekonomi (kehancuran rumah dan sarana publik) masyarakat. Pada “wilayah” modal sosial terjadi perasaan “*social distrust*” antar pihak yang sangat tinggi. Kejadian konflik sosial di berbagai kawasan juga tidak dapat dilepaskan dengan tali-temali setting sosial-ekonomi dan sosio-politik makro yang berlangsung di Indonesia sejak era reformasi

bergulir. Kemiskinan, ketidakpastian nafkah dan sumberdaya serta ketiadaan jaminan sumber penghidupan (*livelihood resources*) memperparah derajat konflik sosial yang terjadi.

Dalam kondisi yang serba kompleks seperti itu, maka tidak mudah bagi siapapun dan dengan cara apapun untuk menemukan solusi konflik sosial secara jitu dan manjur untuk semua kasus. Oleh karena itu, penyelesaian konflik sepantasnyalah diletakkan kembali dalam bingkai lokalitas dan didekati secara lokalitas pula. Pendekatan sepantasnya dilakukan secara bertahap-tahap, dan yang terpenting adalah selalu melibatkan semua pihak terkait dalam konflik untuk berpartisipasi aktif dalam mencari solusi konflik. Hanya dengan pendekatan ini, maka pemahaman akan akar-konflik serta penyelesaian konflik menjadi lengkap dan menyeluruh. Segala cara yang menafikan *proses-proses partisipatif* dan *bottom-up approach* adalah upaya yang akan menghadapi kesia-siaan, karena konflik sosial pada hakekatnya adalah wujud riil interaksi sosial dimana para-pihaklah yang tahu mengapa mereka berinteraksi sosial dalam “jalur konflikktual” dan bukan kerjasama yang sinergetik.

## Rujukan dan Bahan Bacaan

- Adler, P. S. 2000. Natural Resources Conflict Resolution: Water, Science, and The Search for Common Ground. 1<sup>st</sup> Australian Natural Resources Law and Policy Conference. Canberra.
- Anonymous. 1996. Managing Conflict in the Post-Cold War World: The Role of Intervention. The Aspen Institute. Washington, D.C.
- \_\_\_\_\_. 2006. Conflict Management over Natural Resources Capacity Building Program under the Community-Based Rural Development Program Project. FAO. Rome
- Anwar, D. F. *et al.* 2005. Violent Internal Conflicts in Asia Pacific: Histories, Political Economies and Policies. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta
- Bebbington, A. 1997. Social Capital and Rural Intensification: Local Organizations and Islands of Sustainability in the Rural Andes. *Geographic Journal*, Vol. 163/2, pp. 189-197.
- Buckles, D and Rusnak, G. 1999. Conflict and Collaboration in Natural Resource Management. *in* Buckles, D. *et. al.* (ed). 1999. Cultivating Peace: Conflict and Collaboration in Natural Resources Management IDRC World Bank. Washington D.C.
- Castro, A. P and Nielsen, E. 2003. Natural Resource Conflict Management Case Studies: An Analysis of Power, Participation and Protected Areas. FAO. Rome.
- Luckham, R. 1998. Democratic Institutions and Politics in Context of Inequality, Poverty, and Conflict. IDS Working Paper No. 104.
- Malik, I. *et. al.* 2003. Menyeimbangkan Kekuatan: Pilihan Strategi Menyelesaikan Konflik atas Sumberdaya Alam. Yayasan Kemala. Jakarta.
- Oberschall, A. 1978. Theories of Social Conflict. *Annual Review of Sociology* Vol. 4, pp. 291-315.
- Tadjoeddin, M. Z. 2006. A Future Resource Curse in Indonesia: The Political Economy. UNDP. Jakarta.

- UNSFIR, 2004. Indonesian Collective Violence Database 2004. United Nation Development Program. Jakarta
- Varshney, A. *et al.* 2006. Creating Datasets in Information-Poor Environments: Patterns of Collective Violence in Indonesia (1990-2003). American Political Science Association. Philadelphia.
- Zartman, I. W. 2000. Mediation in Ethnic Conflicts. Center for Development Research. Bonn